

## DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.*
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.*
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2019, *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-486/PJ/2019 tentang Kebijakan Perpajakan terhadap Penyetoran atas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Jatuh Tempo Pada Tanggal 10 Juni 2019.*
- Republik Indonesia. 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.*
- Republik Indonesia. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.*
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Edisi Keenam. Yogyakarta: Salemba Empat.